

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) BANDA ACEH
TAHUN 2019-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**ANDARA LESTARI
NPM : 1902110086**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 31 Juli 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ANDARA LESTARI
NPM : 1902110086

Dengan judul:

**ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BANDA ACEH
TAHUN 2019-2021**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II

Fitri Yunina, SE., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 31 Juli 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ANDARA LESTARI

NPM : 1902110086

Dengan judul:

**ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BANDA ACEH
TAHUN 2019-2021**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 25 Juli 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Fitri Yunina, SE., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Anggota

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan



Andara Lestari

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andara Lestari
NPM : 1902110086
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BANDA ACEH TAHUN 2019-2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Andara Lestari

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **”Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak zulkifli Umar, SE, M.Si. Ak. CA selaku Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah aceh.

5. Ibu Eva Susanti, SE.M.Si dan Ibu Fitri Yunina, SE.M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Mama, Bapak dan Abang tercinta. Dengan perjuangan dan air mata akhirnya saya berhasil sekolah jenjang S-1, dan Gelar Sarjana ini saya persembahkan untuk Keluarga saya.
8. Kelvin Novriandy, Rizqi Amini, Ilham Syahputra dan Teuku Robby Dirgahari yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk kelancaran skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta para sepupu yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, Juni 2023
Penulis

Andara Lestari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1 Kinerja Keuangan	8
2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan	8
2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan	9
2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan	10
2.2.4 Indikator Kinerja Keuangan	11
2.2 <i>Value for Money</i>	12
2.2.1 Pengertian Konsep <i>Value for Money</i>	12
2.2.2 Langkah-langkah <i>Value for Money</i>	14
2.2.3 Manfaat <i>Value For Money</i>	16
2.3 Penelitian Sebelumnya	17
2.4 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	22
3.1.2 Jenis Penelitian	22
3.1.3 Horison Waktu	22
3.1.4 Unit Analisis	22
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.3 Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.2 Hasil Penelitian	30

4.2.1 Rasio Ekonomi Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021	30
4.2.2 Rasio Efisiensi Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021.....	33
4.2.3 Rasio Efektivitas dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021.....	36
4.3 Pembahasan	39
BAB V KESIMPULAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi	24
Tabel 3.2	Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	25
Tabel 3.3	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	26
Tabel 4.1	Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan	28
Tabel 4.2	Jumlah PNS Menurut Jabatan/Eselonering	28
Tabel 4.3	Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan	29
Tabel 4.4	Sumber Daya Pendukung di BPBD	30
Tabel 4.5	Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi	31
Tabel 4.6	Rasio Ekonomi dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021	32
Tabel 4.7	Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi	34
Tabel 4.8	Rasio Efisiensi Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021	35
Tabel 4.9	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	37
Tabel 4.10	Rasio Efektivitas dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4.1 Rasio Ekonomi	32
Gambar 4.2 Rasio Efisiensi	35
Gambar 4.3 Rasio Efektivitas	38

**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) BANDA ACEH
TAHUN 2019-2021**

**Andara Lestari
1902110086**

**Pembimbing : 1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
2. Fitri Yunina, SE.M.Si**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja yang dianalisis menggunakan *Value For Money* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 teknik yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi pada tahun 2019 berjumlah 102,73%, tahun 2020 berjumlah 85,78% dan tahun 2021 berjumlah 97,08%. Rata-rata persentase keseluruhan yaitu sebesar 95,19% dimana dikategorikan ekonomi. Rasio efisiensi tahun 2019 berjumlah 281,80 dikategorikan tidak efisien dan pada tahun 2021 sebesar 87,57% dikategorikan cukup efisien. Secara keseluruhan persentase rata-rata rasio efisiensi sebesar 165,09 dikategorikan tidak efisien. Rasio efektivitas tahun 2019 yaitu sebesar 71,19 dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2020 sebesar 27,07 dikategorikan tidak efektif, dengan persentase rata-rata sebesar 45,91% dikategorikan tidak efektif.

Kata Kunci : *Value For Money*, Pengukuran Kinerja Keuangan

**VALUE FOR MONEY ANALYSIS IN MEASUREMENT OF FINANCIAL
PERFORMANCE IN MANAGEMENT AGENCY REGIONAL
DISASTER (BPBD) BANDA ACEH
YEAR 2019-2021**

**Andara Lestari
1902110086**

**Mentor : 1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
2. Fitri Yunina, SE.M.Si**

ABSTRACT

This study aims to determine performance measurements that are analyzed using Value For Money at the Banda Aceh Regional Disaster Management Agency (BPBD) in 2019-2021. The data collection technique is the documentation technique. The data analysis technique in this study is to use 3 techniques, namely economic ratios, efficiency ratios and effectiveness ratios. The results of the research show that the economic ratio in 2019 was 102.73%, in 2020 it was 85.78% and in 2021 it was 97.08%. The overall average percentage is 95.19% which is categorized as economic. The efficiency ratio in 2019 was 281.80 which was categorized as inefficient and in 2021 it was 87.57% which was categorized as quite efficient. Overall, the average percentage of efficiency ratio of 165.09 is categorized as inefficient. The effectiveness ratio in 2019 was 71.19 which was categorized as less effective and in 2020 it was 27.07 which was categorized as ineffective, with an average percentage of 45.91% which was categorized as ineffective.

Keywords: *Value For Money, Financial Performance Measurement*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan instansi pemerintahan menggambarkan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2016).

Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian manajemen strategis. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis. Dengan

memahami siklus manajemen strategis tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis.

Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik (Mahmudi, 2015:7). Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Value For Money menurut Mardiasmo (2016:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat tangible maupun intangible maka metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*growth and learn*), sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2016:77).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu badan yang melayani publik dalam hal ini berfokus pada Bencana Alam, sehingga dalam

pelaksanaanya tentu ada banyak laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh BPBD Kota Banda Aceh, oleh sebab itu menggunakan analisis *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Badan penanggulangan bencana alam bekerja dalam menanggulangi bencana alam, hal ini tentu saja badan penaggulangan bencana alam memiliki kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja dalam pengelolaan keuangan harus transparan dan memiliki laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan penelitian awal permasalahan yang timbul pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh di antaranya, kurangnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil, dan rendahnya SDM sehingga timbulnya berbagai masalah dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang ada di BPBD Kota Banda Aceh, sehingga *value For Money* di BPBD tidak efisiensi dan tidak efektif, padahal BPBD Kota Banda Aceh membutuhkan anggaran yang besar dalam peningkatakan operasional kinerja BPBP Kota Banda Aceh.

Dengan memperhatikan kinerja dinas Penanggulan Bencana Alam yang kian menjadi sorotan dan juga permasalahan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengukuran kinerja yang dianalisis menggunakan *Value For Money* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja yang dianalisis menggunakan *Value For Money* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan berfikir dan menambah pengetahuan peneliti mengenai *Value For Money* dalam pengukuran kinerja keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Banda Aceh Tahun 2019-2021.
2. Menjadi masukan bagi berbagai pihak terutama Badan Penanggulangan Bencana Banda Aceh sehingga dapat menjadi referensi tambahan mengenai *Value For Money* dalam pengukuran kinerja keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Banda Aceh Tahun 2019-2021.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat menambah pengetahuan, sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menambah wawasan dan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai *Value for Money*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pengukuran dengan metode *Value For Money* diukur berdasarkan pengukuran rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Mulyadi (2016:416) menjelaskan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja merupakan suatu cara manajemen dalam menilai keefektivitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengertian penilaian kinerja menurut Mahmudi (2015:6) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Tiga perangkat kinerja yang paling populer untuk menilai kinerja menurut Robbins (2018:259) yaitu:

1. Hasil tugas individu, dengan menggunakan hasil tugas, maka seseorang pimpinan dapat menilai tinggi rendah kinerja pegawainya.
2. Perilaku, dalam hal ini perilaku adalah kesegaran seseorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya.
3. Ciri, dalam hal ini ciri adalah sikap baik, percaya diri, kooperatif, dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh organisasi atau instansi yang dapat mengukur keberhasilan suatu lembaga dalam menghasilkan kinerja keuangan yang berkualitas, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik pemerintahan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu lembaga atau organisasi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan pemerintahan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan pemerintahan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Menurut Mahmudi (2015:12) pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor public melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.

Pengertian pengukuran kinerja menurut Mulyadi (2016:419) adalah sebagai penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya. Terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja menurut (Mahmudi, 2015:13) yang dapat diaplikasikan organisasi sektor publik yaitu:

1. Analisis Anggaran
Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih atau selisih kurang. Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial dan data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran.
2. Analisis Rasio Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan-hubungan dalam satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini.
3. *Balanced Scored card*
Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek finansial dan non finansial yang diterjemahkan dalam empat perspektif kinerja yaitu, perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan/pembelajaran.
4. Audit Kinerja
Audit Kinerja adalah pengukuran kinerja yang berdasarkan konsep *value for money* yang merupakan perluasan lingkup dari audit finansial. Indikator kinerja terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya.

Mahsun (2013: 25) mengatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja Menurut (Nugrahayu dan Retnani, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya
4. Untuk memberikan penghargaan maupun hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan metode pengukuran yang telah disepakati
5. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi
7. Untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara obyektif
8. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan
9. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

2.1.4 Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2014 : 267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), dimana Indra Bastian menjelaskan :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut Bastian (2014 : 267) adalah :

1. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
4. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Apa yang diungkapkan Bastian (2014:128) diatas, sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2016 : 127) bahwa, istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Yang mana, adapun peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut Bastian (2014 : 128) sebagai berikut:

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan,
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial,
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan
5. Untuk menunjukkan standar kinerja.
6. Untuk menunjukkan efektivitas.
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya

2.2 Value for Money

2.2.1 Pengertian Metode Value for Money

Value for money merupakan metode pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2016:131). *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi

output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Menurut Mahmudi (2015: 83), menyatakan bahwa *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

Mahmudi dalam (Agustin, 2017) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* memberikan informasi yang dapat membentuk fungsi-fungsi pengendalian serta mendorong tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Oleh karena itu, *value for money* dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja harus dapat memberikan manfaat kepada pihak internal yaitu berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan maupun kepada

pihak eksternal yaitu mengontrol dan sekaligus memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2015:83), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

1. Ekonomi: konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar. Adapun indikator rasio ekonomi dapat diukur sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Angaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

2. Efisiensi: efisien terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output per unit input. Adapun indikator efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

3. Efektivitas: efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Adapun indikator efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmo, 2016: 130), yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*Spending Wisely*).

2.2.2 Langkah-langkah *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2016:133) ada empat langkah dalam pengukuran *Value for Money* yaitu sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi
Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.
2. Pengukuran Efisiensi
Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep *Value for Money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
3. Pengukuran Efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali

lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengukuran *Outcome*

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik (Renyowijoyo, 2013:5), antara lain:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan *resources*;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan
5. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

2.2.3 Manfaat *Value For Money*

Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas dan kinerja sektor publik. Menurut Mardiasmo dalam Septariani (2016), manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Meitri dan Suanti (2022) dengan judul “Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 perhitungan ekonomis sebesar 96,64% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi sebesar 103,48% dikatakan efisien, dan perhitungan efektivitas sebesar 99,52% dikategorikan tidak efektifitas. Tahun 2020 perhitungan ekonomis sebesar 91,44% dikategorikan ekonomis, sebesar 103,99% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas sebesar 89,01% dikategorikan tidak efektifitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi, mendapatkan 86,54%, 82,64% dan 71,43% yang berarti rasio ekonomi adalah di bawah 100% selama tahun 2014-2016 dan hasil rasio ini menunjukkan bahwa kriteria rasio ekonomi memperoleh kategori ekonomis. Rasio efisiensi selama tahun penelitian rasio ini adalah 94,69%, 105,17% dan 97,95 %, meskipun pada

tahun 2015 rasio tersebut kurang efisien karena dalam persentase di atas 100%. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dikategorikan efisien. Sedangkan rasio efektivitas, diperoleh 96,53%, 86,65% dan 76,98%, dimana rasio persentase di bawah 100% menunjukkan bahwa rasio ini memperoleh kriteria tidak efektif.

Sulastiningsih (2015) dengan judul Pengukuran Kinerja Berbasis *value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dengan judul penelitian Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya.

Khikmah, Alayyal (2014) meneliti tentang Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *value for money* diperoleh bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari segi efisiensinya, maka kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien karena rasio memperlihatkan hasil kurang dari 100%. Untuk lebih terperinci maka dilampirkan tabel berikut ini:

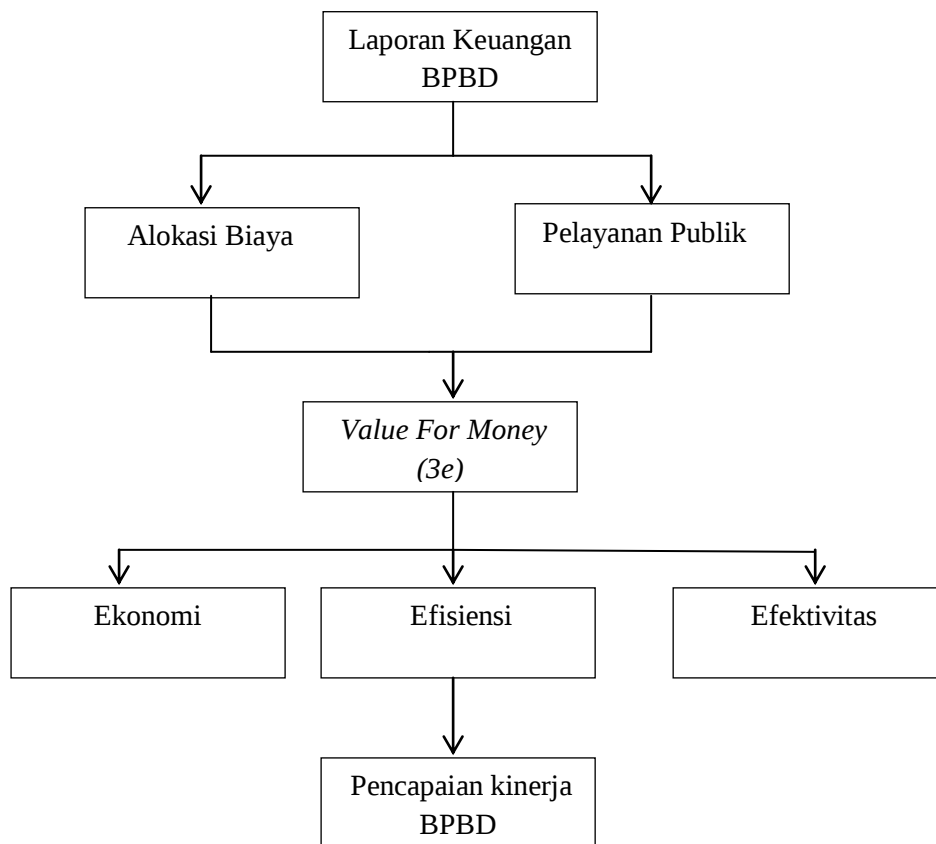
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Meitri dan Suanti (2022)	Kuantitatif	Tahun 2019 perhitungan ekonomis sebesar 96,64% dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi sebesar 103,48% dikatakan efisien, dan perhitungan efektivitas sebesar 99,52% dikategorikan tidak efektivitas. Tahun 2020 perhitungan ekonomis sebesar 91,44% dikategorikan ekonomis, sebesar 103,99% dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas sebesar 89,01% dikategorikan tidak efektivitas.	• <i>Value For Money</i> • Kinerja Keuangan	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian
2	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode (2014-2016) (Indrayani dan Khairunnisa, 2018)	Kuantitatif	Rasio ekonomi, mendapatkan 86,54%, 82,64% dan 71,43% yang berarti rasio ekonomi adalah di bawah 100% selama tahun 2014-2016 dan hasil rasio ini menunjukkan bahwa kriteria rasio ekonomi memperoleh kategori ekonomis. Rasio efisiensi selama tahun penelitian rasio ini adalah 94,69%, 105,17% dan 97,95 %, meskipun pada tahun 2015 rasio tersebut kurang efisien karena dalam persentase di atas 100%. Namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dikategorikan efisien. Sedangkan rasio efektivitas, diperoleh 96,53%, 86,65% dan 76,98%, dimana rasio persentase di bawah 100% menunjukkan bahwa rasio ini memperoleh kriteria tidak efektif.	• Konsep <i>Value For Money</i>	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian
3	Pengukuran Kinerja Berbasis <i>value For Money</i> Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara (Sulastiningsih, 2015)	Kuantitatif	Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.	• Pengukuran kinerja	• Tempat Penelitian • Waktu penelitian

No	Judul, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ili (Putra, 2014)	Kuantitatif	Rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya.	Konsep <i>Value For Money</i>	- Tempat Penelitian - Waktu penelitian
5	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> . (Khikmah Alayyal, 2014)	Kuantitatif	<i>Value for money</i> diperoleh bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari segi efisiensinya, maka kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien karena rasio memperlihatkan hasil kurang dari 100%.	Konsep <i>Value For Money</i>	- Tempat Penelitian - Waktu penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kerangka dalam melakukan penelitian untuk melihat alur dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibuat untuk menentukan tujuan dalam penelitian ini agar tujuan penelitian ini semakin jelas arah nya, seperti laporan keuangan BPBD, alokasi biaya, pelayanan publik, *Value For Money*, yang terdiri dari rasio ekonomo, efisiensi dan rasio efektivitas sehingga tercapai nya pencapaian kinerja BPBP Kota Banda Aceh, maka yang menjadi kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan BPBD untuk alokasi biasa dan pelayanan publik dengan analisis *value for money* yang terdiri dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Sehingga baru bisa dilihat bagaimana pencapaian kinerja BPBD dalam pengaturan kinerja keuangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana yang berlokasi di Jalan Teungku Daud Beureueh No. 18 Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang menjadi objek penelitian adalah analisis *Value For Money* dalam pengukuran kinerja keuangan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, perhitungan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dengan menghitung dan menyajikan kinerja menggunakan metode *value for money* pada Penanggulan Bencana Banda Aceh.

3.1.3 Horison Waktu

Horizon waktu yang digunakan studi *Time Series*. Studi *Time Series* lebih menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini merupakan aspek-aspek kinerja yang terdiri dari aspek ekonomi, rasio efisiensi, rasio efektivitas.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2012: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi data sekunder yang telah diperoleh yaitu mengenai laporan keuangan yang ada di BPBD terdiri dari tiga rasio yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran di kantor Dinas Penanggulangan Bencana Banda Aceh tahun 2019-2021.

2. Wawancara

Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait secara langsung pada Dinas Penanggulangan Bencana Banda Aceh untuk memperoleh informasi mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2019-2021.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan (Mardiasmo:2016) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi

Mardiasmo (2016: 4) menyebutkan bahwa rasio ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan *input value*. Input dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Menurut (Khikmah, 2014:78) dari penjelasan tersebut, secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Indra Bastian 2014:280). Khikmah (2014:79) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input :Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016:134). Menurut Agustin (Khikmah:89) pengukuran Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh.

Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh pada saat ini semakin menunjukkan kualitas yang tidak bisa diabaikan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja bidang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui berbagai mekanisme antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti BPBA, SAR, TNI/Polri, DPRK, Pereguruan Tinggi, LSM, Pihak Swasta dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

Diharapkan kehadiran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh sebagai perangkat Daerah Kota agar dapat membantu

masyarakat dalam menanggulangi bencana yang dihadapi. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 berjumlah 61 orang terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil dan 23 orang pewartawai Non PNS. Berikut jumlah Pegawai yang ada di BPBD pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah PNS Menurut Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7 Orang
2	Golongan III	19 Orang
3	Golongan II	12 Orang
4	Golongan I	- Orang
	Jumlah	38 orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah PNS menurut pangkat/golongan dimana golongan IV berjumlah 7 orang, golongan III berjumlah 19 orang dan golongan II berjumlah 12 orang yang terakhir golongan I berjumlah 0. Jumlah keseluruhan adalah 38 orang.

Tabel 4.2
Jumlah PNS Menurut Jabatan/Eselonering

No	Golongan	Jumlah
1	Kepala	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kabid	3 Orang
4	Kasubbag/Kasi	8 Orang
	Jumlah	13 orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS menurut Jabatan/Eselonering kepala berjumlah 1 orang, sekretaris berjumlah 1 orang, Kabid berjumlah 3 orang, Kasubbag/Kasi berjumlah 8 orang. Jumlah 13 orang.

Tabel 4.3
Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	S2	3 Orang
2	S1	24 Orang
3	DIII	1 Orang
4	DII	0 Orang
5	SLTA	33 Orang
6	SLTP	0 Orang
7	SD	0 Orang
	Jumlah	61 orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS menurut jabatan/Eselonering S2 berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 24 orang, DIII berjumlah 1 orang, DII berjumlah 0 orang, SLTA berjumlah 33 orang, SLTP berjumlah 0 orang dan SD 0 orang.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja adalah tersedianya barang-barang inventaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh. Pengadaan barang Inventaris tersebut berasal dari dana APBK, juga bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sumber Daya Pendukung di BPBD

No	Uraian	Unit
1	Tanah (temat gudang Logistik)	1
2	Gedung dan Bangunan Logistik	1 unit
3	Mobil Operasional rada 4	6 Unit
4	Kendaraan Roda Dua	3 Unit
5	Peralatan dan Mesin	7 Unit
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	420 Unit
7	Alat Studio dan Komunikasi	52 Unit
8	Instalasi Listrik dan Telepon	1 Unit

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Rasio Ekonomi dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019 - 2021

Rasio ekonomi merupakan perbandingan antar *input* dan *input value*. *Input* dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran (Mardiasmo, 2016:4). Pengukuran rasio ekonomi ini dapat dihitung dengan persentase jumlah anggaran dan realisasi pada BPBD. dengan adanya jumlah persentase yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut, maka baru dapat dipastikan rasio tersebut ekonomis atau tidak.

Untuk anggaran tiap tahunnya yaitu dari tahun 2019 s/d 2021 menerima anggaran rata-rata sebesar Rp. 9.868.498.103,33. Realisasi anggaran rata-rata pertahunnya, terhitung dari tahun 2019 s/d 2021 berjumlah Rp. 9.143.874.272,83. Program dari realisasi tersebut untuk 1) Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kota seperti (a) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, (b) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, (c) kegiatan administrasi

umum perangkat daerah dan lain sebagainya. 2) Program penanggulangan bencana seperti (a) kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, (b) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (c) kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Dimana:

Tabel 4.5
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat ekonomis
2	90% – 100%	Ekonomis
3	80% – 90%	Cukup Ekonomis
4	60% – 80%	Kurang Ekonomis
5	< 60%	Tidak Ekonomis

Maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2019} = \frac{5.598.886.418}{5.449.887.743} \times 100\% = 102,73\%$$

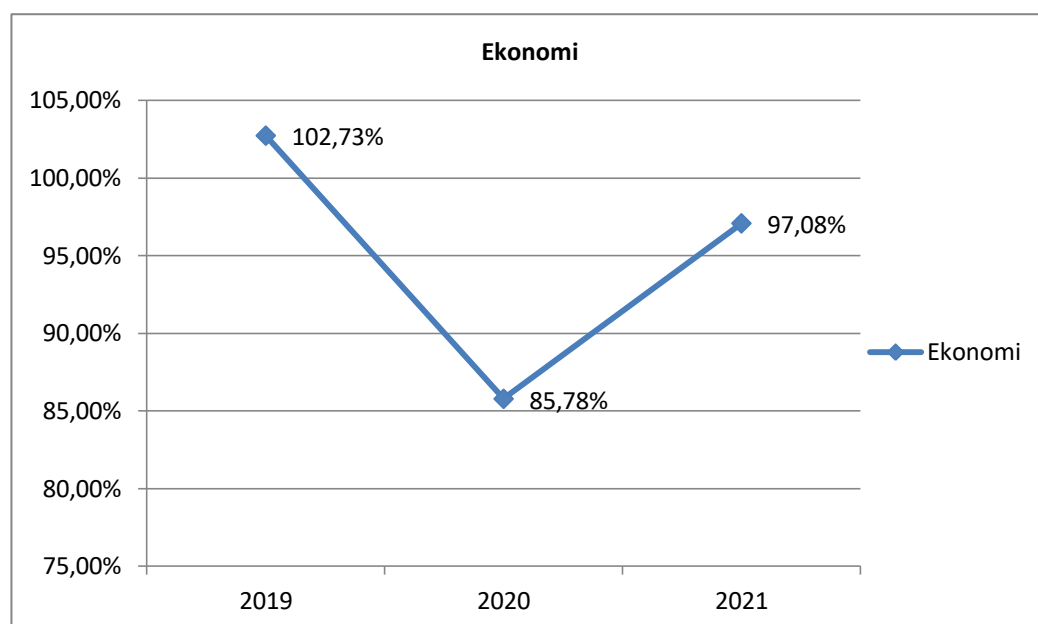
$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2020} = \frac{12.295.903.163}{14.332.662.527} \times 100\% = 85,78\%$$

$$\text{Rasio Ekonomi tahun 2021} = \frac{9.536.833.237,51}{9.822.944.040} \times 100\% = 97,08\%$$

Tabel 4.6
Rasio Ekonomi dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Realisasi	Anggaran	Rasio	Keterangan
1	2019	5.598.886.418	5.449.887.743	102,73%	Sangat ekonomis
2	2020	12.295.903.163	14.332.662.527	85,78%	Cukup ekonomis
3	2021	9.536.833.237,51	9.822.944.040	97,08%	Ekonomis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 rasio ekonomi dikatakan sangat ekonomis kemudian turun pada tahun 2020 menjadi cukup ekonomis dan kemudian stabil lagi menjadi ekonomis. Dengan persentase rata-rata sebesar 95,19%.



Gambar 4.1
Rasio Ekonomi

Berdasarkan grafik di atas, rasio ekonomi pada tahun 2019 dengan persentase 102,73% di kategorikan sangat ekonomis dan pada tahun 2020 dengan

persentase 85,78% dikategorikan cukup efektif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi cukup ekonomis dan kemudian kembali menjadi ekonomis pada tahun 2020. Berdasarkan gambar 4.1, dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan dari tahun cukup baik dari nilai rata-rata keseluruhan persentase 95,19% dikategorikan ekonomis dalam merealisasikan seluruh anggaran dari total anggaran yang disediakan oleh pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan di BPBD. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPBD Kota Banda Aceh dengan menggunakan rasio ekonomi dari tahun 2019 sampai 2021 dikategorikan ekonomis dalam merealisasikan seluruh anggaran dari total anggaran yang disediakan.

4.2.2 Rasio Efisiensi dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019 - 2021

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisiensi suatu organisasi (Bastian, 2014:280).

BPBD Kota Banda Aceh dalam pada saat ini semakin menunjukkan kualitas yang tidak bisa diabaikan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai satuan kerja BPBD Kota Banda Aceh. BPBD Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui berbagai mekanisme antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti BPBA, SAR, TNI/Polri, DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, Pihak swasta dan unsur

masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa). BPBD menggunakan pengeluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD dengan meningkatkan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan. Rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Dimana :

Tabel 4.7
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Tidak Efisien
2	90% – 100%	Kurang Efisien
3	80% – 90%	Cukup Efisien
4	60% – 80%	Efisien
5	< 60%	Sangat Efisien

Maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2019} = \frac{5.598.886.418}{1.986.813.000,00} \times 100\% = 281,80\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2020} = \frac{12.295.903.163}{9.764.340.784,00} \times 100\% = 125,92\%$$

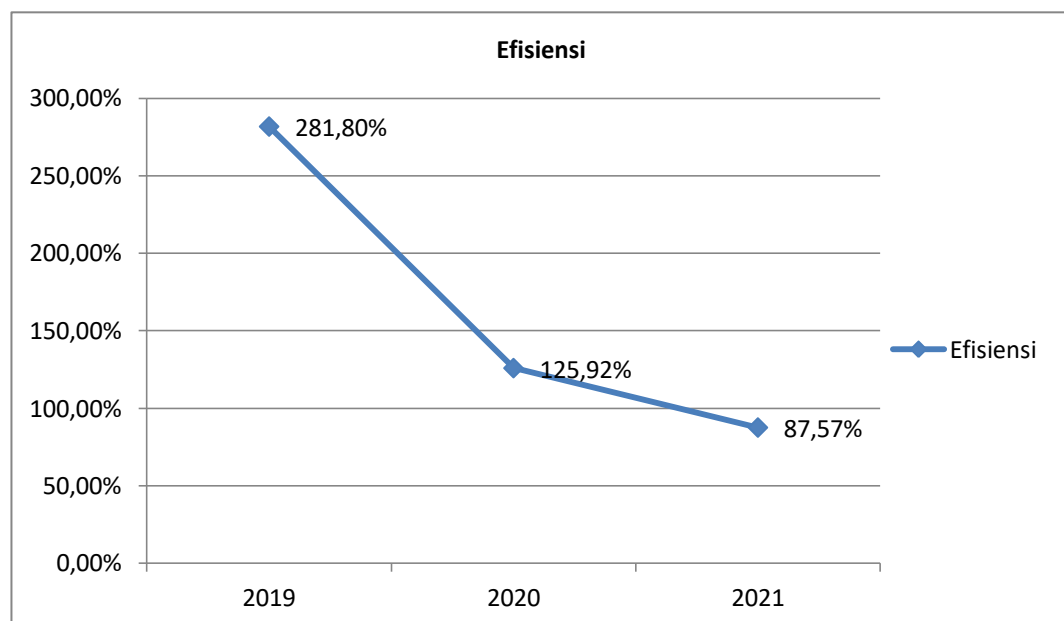
$$\text{Rasio Efisiensi tahun 2021} = \frac{9.536.833.237,51}{10.889.643.984,51} \times 100\% = 87,57\%$$

Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Rasio Efisiensi Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Hasil	Keterangan
1	2019	5.598.886.418	1.986.813.000,00	281,80 %	Tidak Efisien
2	2020	12.295.903.163	9.764.340.784,00	125,92%	Tidak Efisien
3	2021	9.536.833.237,51	10.889.643.984,51	87,57%	Cukup Efisien

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dijelaskan bahwa rasio efisiensi pada BPBD Tahun 2019 dan Tahun 2020 dikategorikan tidak efisien kemudian pada tahun 2021 menjadi cukup efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada grafik sebagai berikut:



Gambar 4.2
Rasio Efisiensi

Berdasarkan gambar 4.2, dapat dijelaskan bahwa rasio efisiensi tahun 2019 berjumlah 281,80% dikategorikan tidak efisien, pada tahun 2020 berjumlah

125,92% dan pada tahun 2021 sebesar 87,57% dikategorikan cukup efisien. Masih tidak efisiennya BPBD Kota Banda Aceh memang diakui sendiri oleh BPBD karena masih banyak kendala atau hambatan yang dijumpai oleh BPBD dalam menjalankan fungsinya.

Walaupun ada hambatan dalam menjalankan operasionalnya BPBD tetap terus bekerja lebih aktif untuk dapat meningkatkan eksistensinya dalam penanggulangan bencana hal ini terbukti pada tahun 2021 dimana kinerja suatu organisasi yaitu BPBD pada Tahun 2021 cukup efisien dibandingkan tahun 2019 dan Tahun 2020 sebelumnya yang tidak efisien. Nampaknya hambatan tidak membuat BPBD untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya untuk membantu dan menyelenggarakan kinerja pelaksana penanggulangan bencana daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPBD Kota Banda Aceh dengan menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2019 s/d 2020 tidak efisien. Sedangkan tahun 2021 cukup efisien dalam merealisasikan seluruh anggaran dari total anggaran yang disediakan.

4.2.3 Rasio Efektivitas dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021

Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016:134).

Organisasi publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Organisasi publik bertujuan untuk memfasilitasi, membantu, menyelenggarakan upaya-upaya pelayanan yang membantu masyarakat ketika membutuhkan bantuan. Seperti halnya yang dilakukan oleh BPBD dimana dengan kehadiran BPBD Kota Banda Aceh dapat membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana yang dihadapi. Rasio efektivitas diukur untuk mengetahui seberapa besar BPBD dalam mencapai tujuannya dalam melaksanakan kinerjanya.

Pengukuran Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Dimana :

Tabel 4.9
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	100%- Atas	Sangat efektif
2	90% – 100%	Efektif
3	80% – 90%	Cukup Efektif
4	60% – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

Maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2019} = \frac{3.879.924.636}{5.449.887.743} \times 100\% = 71,19\%$$

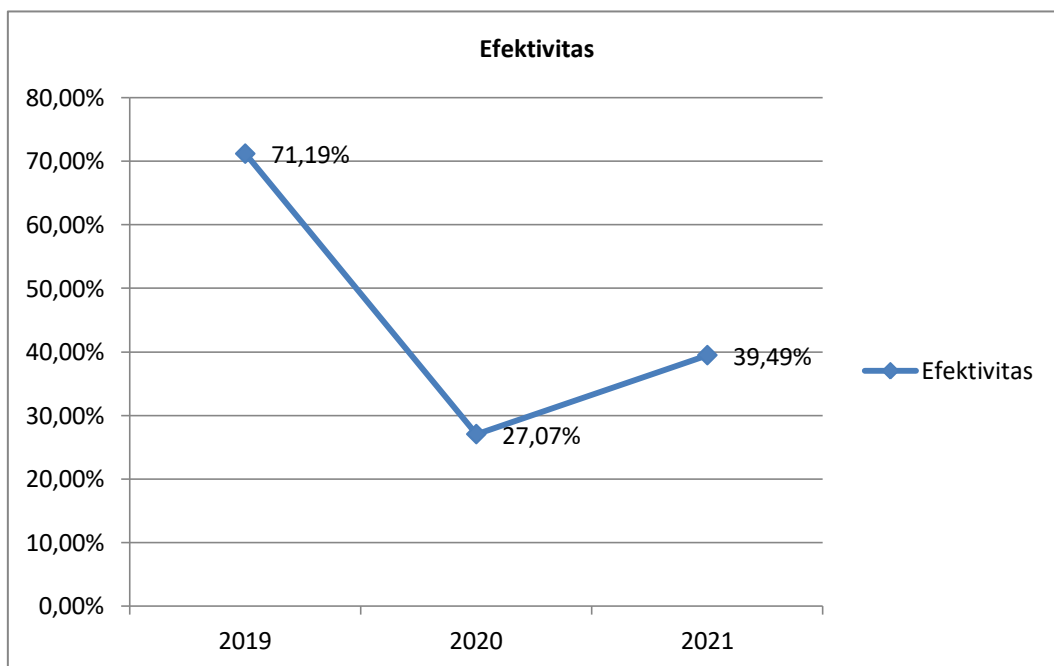
$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2020} = \frac{3.879.924.636}{14.332.662.527} \times 100\% = 27,07\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas tahun 2021} = \frac{3.879.274.200,51}{9.822.944.040} \times 100\% = 39,49\%$$

Tabel 4.10
Rasio Efektivitas Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Hasil	Keterangan
1	2019	3.879.924.636	5.449.887.743	71,19%	Kurang efektif
2	2020	3.879.924.636	14.332.662.527	27,07%	Tidak efektif
3	2021	3.879.274.200,51	9.822.944.040	39,49%	Tidak efektif

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rasio efektivitas tahun 2019 kurang efektif dan tahun 2020 serta tahun 2021 menjadi tidak efektif, jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Banda Aceh dalam bekerja belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 4.3
Rasio Efektivitas

Berdasarkan grafik 4.3 dapat dijelaskan bahwa rasio efektivitas tahun 2019 yaitu sebesar 71,19% dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2020 sebesar 27,07% dikategorikan tidak efektif dan pada tahun 2021 sebesar 39,49% juga belum efektif.

Meski belum mencapai target dalam melaksanakan pekerjaan hal ini dikarenakan pada sisi program dan kegiatan masih sangat terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada setiap program atau kegiatan sehingga hasil yang dicapai belum terlalu optimal. Dan dalam pelaksanaan kegiatannya adaya hal-hal baru yang muncul bersamaan dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan rencanakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPBD Kota Banda Aceh dengan menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2019 kurang efektif. Sedangkan tahun 2020 s/d 2021 tidak efektif dalam merealisasikan seluruh anggaran dari total anggaran yang disediakan.

4.3 Pembahasan

Kebijakan akuntansi pemerintah kota dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan perubahan kebijakan akuntansi sebagai dasar di dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh. Akuntansi secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Value for money merupakan konsep pengelolaan keuangan sektor publik, dalam sektor publik *value for money* ini sangat penting terdiri dari beberapa rasio diantaranya adalah rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas, ketiga rasio ini sangat penting pada organisasi sektor publik dalam mengelola keuangan. Untuk Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Rasio Ekonomi dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021

Rasio ekonomi adalah perbandingan antara *input* dan *input value* dimana *input* adalah target dan *input value* adalah realisasi anggaran. Dalam hal ini BPBD

bekerja sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh BPBD dalam operasional kegiatan Bencana yang ada di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian berdasarkan tabel 4.6 diperoleh untuk rasio ekonomi tahun 2019 berjumlah 102,73%, tahun 2020 berjumlah 85,78% dan tahun 2021 berjumlah 97,08%. Penelitian ini didukung Sulastiningsih (2015) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.

Hasil tersebut dapat digambarkan bahwa dari target anggaran yang telah dibuat oleh BPBD sehingga terealisasi anggaran pada tahun 2019 sangat ekonomis, tahun 2020 cukup ekonomis serta tahun 2021 ekonomis secara rata-rata persentase keseluruhan yaitu sebesar 95,19% dimana dikategorikan ekonomi. BPBD dalam membuat target anggaran dan realisasi untuk melakukan program kegiatan yang ada di BPBD yaitu sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - b. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya

- c. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 3) Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan pelayanan informasi rawan Bencana Kabupaten Kota, terdiri dari:
 - 1) Kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)

b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terdiri dari:

- 1) Kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi
- 2) Kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari

- 1) Kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan respon cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah penyakit

4.3.2 Rasio Efisiensi Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021

Rasio efisien menggambarkan keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan dan segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan. Berdasarkan tabel 4.8 Rasio efisiensi pada tahun 2019 berjumlah 281,80%, rasio efisiensi tahun 2020 berjumlah 125,92% dan Tahun 2021 berjumlah 87,57% dikategorikan cukup efisien. Secara keseluruhan

persentase rata-rata rasio efisiensi sebesar 165,09% dikategorikan tidak efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) menunjukkan bahwa Rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya.

Rasio efisien menggambarkan keluaran yang dicapai dalam suatu program/ kegiatan dan segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan belum efisien hal ini dikarenakan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam masalah biaya. Biaya yang tidak mencukupi melakukan kegiatan menjadi salah satu penyebab tidak efisiennya pengeluaran biaya dan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program sehingga target kinerja yang diharapkan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

4.3.3 Rasio Efektivitas Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh Tahun 2019-2021

Rasio efektivitas menggambarkan suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel 4.10 Rasio efektivitas tahun 2019 berjumlah 71,19%, Tahun 2020 berjumlah 27,07% dan tahun 2021 berjumlah 39,49%. Adapun persentase rata-rata keseluruhan adalah 45,91% dikategorikan tidak efektif. Penelitian ini didukung oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas, diperoleh 96,53%, 86,65%

dan 76,98%, dimana rasio persentase di bawah 100% menunjukkan bahwa rasio ini memperoleh kriteria tidak efektif.

Dalam hasil penelitian ini dimana BPBD belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena masih belum efektif, banyak kendala yang dihadapi oleh BPBD ketika belum mencapai target atau tujuan yang ditetapkan salah satunya adalah keterbatasan biasa dalam pelaksanaan operasional kerja secara keseluruhan target kerja atau tujuan yang telah dicapai dengan persentase rata-rata sebesar 45,91% dikategorikan tidak efektif. Tetapi walau bagaimanapun BPBD selama lebih dari 5 tahun terakhir ini telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui berbagai mekanisme antara lain dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti BPBA, SAR, TNI/POLRI, DPRK, Perguruan Tinggi, LSM, Pihak Swasta dan unsur masyarakat sampai ke tingkat gampong (desa).

- 1.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di BPBD Banda Aceh, maka peneliti mencoba menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Rasio ekonomi pada tahun 2019 berjumlah 102,73%, tahun 2020 berjumlah 85,78% dan tahun 2021 berjumlah 97,08%. Rata-rata persentase keseluruhan yaitu sebesar 95,19% dimana dikategorikan ekonomis.
2. Rasio efisiensi tahun 2019 berjumlah 281,80 dikategorikan tidak efisien dan pada tahun 2021 sebesar 87,57% dikategorikan cukup efisien. Secara keseluruhan persentase rata-rata rasio efisiensi sebesar 165,09 dikategorikan tidak efisien.
3. Rasio efektivitas tahun 2019 yaitu sebesar 71,19 dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2020 sebesar 27,07 dikategorikan tidak efektif, dengan persentase rata-rata sebesar 45,91% dikategorikan tidak efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Banda Aceh untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan BPBD dalam melaksanakan operasionalnya.

2. Diharapkan kepada Badan penanggulangan Bencana daerah untuk lebih efisien dan efektif lagi dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja BPBD dapat diunggulkan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang *Value For Money* lebih mendalam lagi dengan berbagai macam rasio, untuk menggali informasi yang lebih akurat dan mendalam sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D.R. (2017). Konsep Value For Money dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 6, Nomor 6.
- Bastian . (2014). *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, 1997.
- Hasan, M. Iqbal. (2012). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Indrayani dan Khairunnisa (2018) Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi*.
- Khikmah, Alayyal. (2014). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Muhammad. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo.(2016). *Akuntansi Sektor Publik*.Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyadi. (2016).*Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Meitri Adinda Indri dan Suanti Efi. (2022) “Analisis *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampa. *Jurnal Ekonomi Bisni dan Manajemen*. Vol. 1 No. 1.
- Nugrahayu, E. R, & Retnani, E. D. (2017). Penerapan Metode Balance Scorecard sebagai Tolak Ukur Pengukuran Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 4 No. (10).
- Putra (2014). Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir. *Jurnal Akuntansi*.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Renyowijoyo, Muindro, (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. (2018). *Perilaku Organisasi. Organizational Behavior*. Jakarta: Salemba Empat.

Sulastiningsih (2015) “Pengukuran Kinerja Berbasis *value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara”. *Jurnal Kajian Bisni*. Vol. 23 No. 1.

Septariani, J. (2016). Penerapan Konsep Value For Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal S1 Akuntansi* Disetujui 14 Nov. 2016.